

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirin, Tatang M. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arief, Barda Nawawi.. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Desmawati, Rahma, et al. *Dinamika Korupsi di Indonesia: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Pustaka Rumah Cinta, t.t.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhaimin, D. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020.
- Mulkan, Hasanah. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Guepedia, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 1994.
- Renggong, Rena. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Setiadi, Edi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

JURNAL

- Anggraeni, Dwi, dan Nur Damayanti. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia." *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 188–196.
- Gurning, Natal, dan Dwi Tambun. "Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9032–9044.

Handoyo, S., dan M. Fakhri. "Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan." *Journal De Facto* 5, no. 1 (2018): 7.

Luntungan, Lintang Tesalonika Natalia. "Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2014): 194.

Sihombing, D. C., A. Syahrin, M. Ablisar, dan M. Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 67.

Wangol, W. A. "Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007.*

KAMUS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi daring diperbarui. Entri "Efektivitas." <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

WEBSITE

Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK. "Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya." 11 Januari 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi daring diperbarui. Entri "efektivitas." <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik." Diakses 1 Mei 2025. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/survei-indikator-tempatkan-kejaksaan-sebagai-lembaga-penegak-hukum-paling-dipercaya-publik-295341-mvk.html>.

Pengadilan Negeri Bandung. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Diakses 6 Februari 2026. <https://sipp.pn-bandung.go.id>.

Pengadilan Negeri Surabaya. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Diakses 12 Maret 2026. <https://sipp.pn-surabayakota.go.id>.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Diakses 12 Maret 2026. <https://sipp.pn-yogyakarta.go.id>.

WAWANCARA

Asep. Wawancara oleh Penulis. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bandung, 19 Juni 2026.